



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI RIAU
UNIT KERJA : DINAS PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIAL ABDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 274904

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.190.200.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/382 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 710.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 308.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 446.600.000
4. Tanah Seluas 538 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
5. Tanah Seluas 1.132 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
6. Tanah Seluas 13.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **633.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.131.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	796.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.700.000.000
Sub Total	Rp.	7.450.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.450.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.